



Kepemimpinan Prabowo Subianto dalam Pengambilan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Prabowo Subianto's Leadership in Policy-Making for the Nutritious Free Meal Program in Indonesia

Zahwa Alia Putri^{1*}, Siti Nur Aisyah², Hidayatun A'liya³, Anyesa Qiara⁴, Riko Prananda⁵, Yulia Hanoselina⁶

Universitas Negeri Padang

Email: zahwaaliaputri103@gmail.com^{1*}, sitinaisyah1308@gmail.com², hidayatunaliya@gmail.com³, anyesaqiara@gmail.com⁴, rikoprانanda304@gmail.com⁵, yuliahanoselina@fis.unp.ac.id⁶

Article Info

Article history :

Received : 20-06-2026

Revised : 22-06-2026

Accepted : 24-06-2026

Published : 26-06-2026

Abstract

Stunting, malnutrition, and unequal access to nutritious food remain challenges facing Indonesia in its efforts to improve the quality of human resources. The government introduced the Free Nutritional Meals Program as a strategy to address various nutritional issues while simultaneously supporting human resource improvement. This study aims to examine Prabowo Subianto's leadership in the policy formulation process for the Free Nutritional Meals Program. The study uses leadership theory as an analytical framework to understand the role of leaders in policymaking and directing program implementation. The method used is descriptive qualitative, with data collected through a literature review of books, journals, scientific articles, and various relevant documents. The results show that Prabowo Subianto employs a firm, visionary leadership style, and focuses on public welfare. This leadership style contributed significantly to the policy formulation process for the Free Nutritional Meals Program, which aims to improve public health, reduce stunting rates, and support the development of Indonesia's human resources.

Keywords: Leadership, Public Policy, Free Nutritional Meals.

Abstrak

Stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses terhadap pangan bergizi masih menjadi persoalan yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia. Pemerintah menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu strategi untuk mengatasi berbagai persoalan gizi sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan mengkaji kepemimpinan Prabowo Subianto dalam proses perumusan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian menggunakan teori kepemimpinan sebagai kerangka analisis untuk memahami peran pemimpin dalam menetapkan kebijakan dan mengarahkan implementasi program. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prabowo Subianto menerapkan gaya kepemimpinan yang tegas, visioner, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Gaya kepemimpinan tersebut berkontribusi penting dalam proses perumusan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, menekan angka stunting, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kebijakan Publik, Makanan Bergizi Gratis.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah pada dasarnya



dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam menentukan arah, tujuan, serta strategi pelaksanaannya. Seorang pemimpin dituntut mampu memahami berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat dan mengubahnya menjadi kebijakan yang dapat memberikan solusi atas kebutuhan publik. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas yang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Program ini dirancang sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kehadiran program tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Selain berfungsi sebagai program bantuan sosial, Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia yang berorientasi pada peningkatan kualitas generasi masa depan. Pemerintah menilai bahwa pemenuhan gizi yang memadai merupakan faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, program ini ditempatkan sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, penetapan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas menunjukkan adanya proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Keputusan tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap makanan bergizi, tetapi juga memperhitungkan manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, kebijakan ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan peran pemimpin dalam menentukan kebijakan yang memberikan dampak luas bagi kehidupan masyarakat.

Thoha (2012) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi individu atau kelompok agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Nugroho (2018) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik sekaligus mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan dan kebijakan publik memiliki hubungan yang erat karena kualitas kepemimpinan turut memengaruhi proses perumusan, pengambilan keputusan, hingga implementasi kebijakan. Prabowo Subianto dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dan menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program unggulan pemerintahannya. Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepemimpinan Prabowo Subianto dalam pengambilan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut, serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif deskriptif dilakukan melalui analisis mendalam terhadap berbagai dokumen dan sumber informasi yang relevan sehingga mampu menghasilkan



pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kepemimpinan Prabowo Subianto dalam proses pengambilan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. Selanjutnya, Sarwono (2006) menjelaskan bahwa studi literatur merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, guna memperoleh landasan teoritis yang mendukung penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam pengambilan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi dengan cara menelaah, memahami, serta mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai dokumen yang membahas Program Makan Bergizi Gratis maupun kepemimpinan dalam kebijakan publik. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber berdasarkan tingkat relevansinya terhadap fokus penelitian. Selanjutnya, informasi yang diperoleh diidentifikasi dan dianalisis untuk memahami kepemimpinan Prabowo Subianto dalam proses pengambilan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis secara lebih mendalam.

KAJIAN TEORI

Teori Kepemimpinan

Dalam setiap organisasi, kelompok, maupun perusahaan, keberadaan seorang pemimpin menjadi unsur yang sangat penting karena berperan dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan memastikan setiap anggota bergerak menuju tujuan yang sama. Kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai posisi formal dalam struktur organisasi, tetapi juga sebagai bagian integral dari fungsi manajerial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan pencapaian target. Peran pemimpin sangat strategis karena berkaitan langsung dengan proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta pembangunan kerja sama antaranggota. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai teori kepemimpinan menjadi landasan penting untuk melihat bagaimana seorang pemimpin mampu memengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Dalam praktiknya, kepemimpinan menjadi faktor penentu yang mampu mendorong peningkatan kinerja, efektivitas kerja, serta stabilitas organisasi secara menyeluruh.

Untuk memahami konsep tersebut secara lebih komprehensif, Alaslan dkk. (2023) menguraikan berbagai pandangan ahli mengenai kepemimpinan sebagai dasar teoritis. Robbins (1991) menjelaskan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memengaruhi kelompok agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sementara itu, Owens (1995) memandang kepemimpinan sebagai proses hubungan timbal balik antara pemimpin dan anggota yang menekankan adanya interaksi dinamis dalam organisasi. Krither dan Kinicki (1986) menambahkan bahwa pengaruh seorang pemimpin idealnya mampu mendorong anggota bertindak secara sukarela tanpa tekanan. Selanjutnya, Hasjmi Ali (1996) dan Cyril O'Donnel menegaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya bertumpu pada kemampuan mengarahkan, tetapi juga pada keterampilan membangun motivasi, antusiasme, dan hubungan kerja yang harmonis. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan strategis untuk memengaruhi, membina, dan menggerakkan anggota organisasi agar tujuan bersama dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.



Teori Kebijakan Publik

Untuk memahami konsep kebijakan publik, terlebih dahulu perlu dipahami makna kebijakan secara umum. Kebijakan dikenal dengan istilah *policy*. Kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman, ketentuan, regulasi, hukum, prinsip, maupun arahan yang dijadikan dasar dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kebijakan publik (*public policy*) merupakan instrumen yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengatur, mengelola, juga menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat. Menurut Kristian dalam (Permana et al., 2025) kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang saling berkaitan dan dibuat oleh individu maupun kelompok aktor politik dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai beserta cara untuk mewujudkannya sesuai dengan situasi tertentu. Pengertian ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan tunggal, melainkan melibatkan berbagai aktor kepentingan serta mempertimbangkan kondisi dan situasi yang melingkupi permasalahan yang dihadapi.

Pandangan mengenai kebijakan publik juga dikemukakan oleh sejumlah ahli. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala bentuk tindakan maupun pilihan untuk tidak bertindak yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil maupun yang tidak diambil oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Selain itu, Dye menekankan bahwa kebijakan yang dihasilkan pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas, didasarkan pada pertimbangan yang objektif, serta mencakup berbagai aktivitas pemerintahan (Islamy dalam Muadi et al., 2016). Sementara itu, Parsons dalam Muadi et al. (2016) memandang kebijakan publik sebagai suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, perhatian utama dalam kajian kebijakan terletak pada tahapan siklus kebijakan, yang meliputi proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Setiap kebijakan pada dasarnya dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen vital bagi pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman serta langkah strategis dalam mengidentifikasi dan menangani masalah yang timbul di masyarakat. Kebijakan publik bukan hanya berupa satu keputusan, melainkan rangkaian keputusan yang saling berkaitan serta melibatkan berbagai aktor kepentingan dengan kondisi dan situasi tertentu.

Teori Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan proses penting dalam suatu organisasi maupun pemerintahan karena berkaitan dengan penentuan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kebijakan publik, pengambilan keputusan dilakukan untuk menentukan solusi atas berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Menurut Siagian dalam (Muktamar et al., 2023), pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan melalui pengumpulan informasi dan data, penyusunan berbagai alternatif tindakan, serta pemilihan pilihan yang dinilai paling sesuai. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara rasional agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Gibson et al. dalam (Muktamar et al., 2023), proses ini terdiri dari tujuh tahapan yaitu menetapkan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan alternatif, memilih salah satu alternatif, dan melaksanakan keputusan tersebut. Dalam Program Makan Bergizi Gratis, keputusan pemerintah diambil dengan mempertimbangkan kondisi gizi



masyarakat Indonesia, tingginya angka stunting, serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Makan Bergizi Gratis sebagai Kebijakan Prioritas Nasional dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu prioritas nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengenai tata kelola pelaksanaan program tersebut menegaskan bahwa pemerintah menyediakan makanan bergizi tanpa biaya kepada kelompok sasaran tertentu sebagai upaya memperbaiki status gizi masyarakat. Kebijakan yang menjadi salah satu program unggulan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan gizi sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran utama (Andreas et al., 2025).

Menurut teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye, kebijakan publik mencakup berbagai tindakan maupun pilihan untuk tidak bertindak yang ditetapkan oleh pemerintah (Widiastuti, 2022). Dalam konteks tersebut, kebijakan pemenuhan gizi ini merupakan bentuk respons pemerintah terhadap persoalan kekurangan gizi, stunting, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat kualitas manusia sebagai fondasi pembangunan nasional. Berdasarkan keterangan yang dimuat dalam presidenri.go.id (2025), Prabowo Subianto menyatakan bahwa kebijakan ini disusun untuk menjamin pertumbuhan anak Indonesia secara optimal serta mendukung perkembangan kemampuan intelektual mereka. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kondisi gizi masyarakat, tetapi juga dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia guna mendukung kemajuan bangsa di masa depan.

Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Pada bagian pertimbangannya ditegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan optimalisasi pemenuhan gizi nasional sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Selain itu, tata kelola pelaksanaannya secara khusus diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Ditinjau dari perspektif kebijakan publik, keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam merespons permasalahan gizi yang berkembang di tengah masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam menyelesaikan masalah publik (Islamy dalam Muadi et al., 2016).

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok sasaran, dapat meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Selain mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045, program ini juga diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dari sektor pendidikan, manfaat yang diharapkan mencakup peningkatan kemampuan intelektual, prestasi akademik, tingkat kehadiran peserta didik,



serta penurunan angka putus sekolah. Sementara itu, dari aspek ekonomi, kebijakan tersebut diproyeksikan dapat mengurangi beban rumah tangga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pemanfaatan hasil produksi petani, peternak, dan nelayan lokal juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping itu, keterlibatan koperasi serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rantai pasok pangan berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru dan memperkuat perekonomian pedesaan.

Tujuan utama kebijakan MBG adalah menekan angka malnutrisi dan stunting di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, manfaat program tersebut telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Berdasarkan laporan yang dimuat di Kompasiana.com (2025), hasil wawancara dengan Silva (25 tahun), seorang ibu menyusui, dan Adiba (8 tahun), siswi sekolah dasar yang menjadi penerima manfaat, menunjukkan adanya tanggapan positif terhadap bantuan yang diberikan. Silva mengungkapkan bahwa keberadaan program tersebut membantu dirinya dalam menjaga pola konsumsi makanan sehingga kondisi kesehatannya tetap terjaga. Sementara itu, Adiba menyatakan bahwa bantuan yang diterimanya memberikan dorongan untuk lebih bersemangat dalam belajar dan mengikuti kegiatan sekolah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pemenuhan gizi ini memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat. Oleh karena itu, implementasi program tidak semestinya hanya dipandang dari sisi kelemahannya, tetapi juga perlu dinilai secara objektif berdasarkan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat.

Meskipun memberikan berbagai manfaat, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan pertama berkaitan dengan cakupan program dan efektivitas penggunaan anggaran. Besaran biaya yang dialokasikan bagi setiap penerima manfaat masih menjadi perhatian karena dikhawatirkan belum sepenuhnya mampu memenuhi standar penyediaan makanan bergizi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti inflasi, perbedaan harga bahan pokok antardaerah, serta tingginya biaya distribusi dan logistik (Zulaika et al., 2025).

Selain faktor anggaran, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Zulaika et al. (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi dan berbagai laporan media, kemampuan para pelaksana masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan laporan keuangan. Di samping itu, koordinasi antarlembaga juga masih menghadapi kendala. Basuki et al. (2026) mengemukakan bahwa pelaksanaan program belum didukung oleh sistem kelembagaan yang terintegrasi secara optimal. Sejumlah instansi, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial, masih memiliki peran yang saling beririsan dalam proses penyaluran, pengawasan, serta evaluasi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum memiliki arah yang seragam karena belum adanya lembaga koordinator tunggal yang mampu menyinergikan berbagai pihak terkait.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sarana, prasarana, dan kondisi infrastruktur yang memengaruhi kesiapan pelaksanaan program. Menurut Zulaika et al. (2025), kondisi geografis yang sulit dijangkau, terutama di wilayah 3T, menjadi salah satu faktor yang



menghambat ketersediaan fasilitas pendukung. Berbagai kekurangan masih ditemukan, antara lain terbatasnya keberadaan dapur sekolah, peralatan memasak, tempat makan yang layak, akses terhadap sumber air bersih, serta sarana transportasi yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur dan penyediaan fasilitas penunjang perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar agar pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi tersebut dapat berlangsung secara optimal dan menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

Kepemimpinan Prabowo Subianto dalam Pengambilan Kebijakan Program Makanan Bergizi Gratis

Kepemimpinan Prabowo Subianto dalam menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan nasional memperlihatkan karakter kepemimpinan yang kuat, tegas, dan memiliki orientasi yang jelas terhadap pembangunan sumber daya manusia. Sejak masa kampanye politik hingga awal pemerintahannya, program ini terus menjadi salah satu agenda utama yang diperjuangkan sebagai solusi atas persoalan gizi masyarakat. Konsistensi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam menjadikan isu pemenuhan gizi sebagai prioritas pembangunan nasional. Menurut Srifridayanti dan Samkamaria (2023), gaya kepemimpinan Prabowo dikenal memiliki karakter karismatik, tegas, serta mampu membangun pengaruh yang kuat terhadap publik. Karakter ini menjadi salah satu modal utama dalam mendorong kebijakan strategis yang membutuhkan dukungan luas dari berbagai pihak.

Apabila dikaji melalui teori kepemimpinan, langkah Prabowo dalam mengutamakan Program MBG menunjukkan kapasitas seorang pemimpin dalam menentukan arah organisasi atau negara menuju tujuan tertentu. Robbins (1991) menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memberikan pengaruh kepada kelompok agar dapat bergerak bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, keputusan untuk memprioritaskan MBG menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan formal, tetapi juga dengan kemampuan membangun kesepahaman dan dukungan terhadap suatu kebijakan. Program ini menjadi contoh bagaimana pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk membentuk agenda pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, teori kepemimpinan dapat digunakan untuk melihat bagaimana Prabowo memainkan peran strategis dalam menentukan arah kebijakan.

Selain menunjukkan ketegasan, kepemimpinan Prabowo juga mencerminkan adanya visi jangka panjang terhadap pembangunan manusia. Program MBG tidak hanya dipahami sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai investasi sosial untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Pemerintah menempatkan gizi sebagai fondasi penting dalam membangun kualitas intelektual, kesehatan, dan produktivitas masyarakat di masa depan. Hal ini sejalan dengan pandangan Merlinda dan Yusuf (2025) yang menyatakan bahwa program makan gratis dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sekaligus memperkuat kualitas pendidikan. Dari sini dapat dilihat bahwa kebijakan MBG memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar bantuan pangan.

Dalam perspektif teori kepemimpinan, visi pembangunan manusia melalui MBG menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya berfokus pada persoalan jangka pendek, tetapi juga pada masa depan bangsa. Kepemimpinan yang efektif harus mampu mengidentifikasi kebutuhan mendasar masyarakat dan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang relevan. Program



MBG menunjukkan bahwa pemenuhan gizi dipandang sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, kebijakan ini menggambarkan bagaimana seorang pemimpin menghubungkan kebutuhan dasar masyarakat dengan tujuan pembangunan nasional yang lebih besar. Hal tersebut memperlihatkan adanya hubungan erat antara kepemimpinan dan arah pembangunan negara.

Dalam proses perumusan kebijakan, kepemimpinan Prabowo juga terlihat dari kemampuannya menjadikan persoalan sosial sebagai agenda utama pemerintah. Permasalahan seperti stunting, malnutrisi, dan ketimpangan akses gizi diposisikan sebagai isu strategis yang membutuhkan intervensi negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki kepekaan terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori kebijakan publik, tindakan tersebut mencerminkan bagaimana kebijakan lahir dari identifikasi masalah yang nyata di lingkungan sosial. Oleh karena itu, MBG dapat dipahami sebagai bentuk respons pemerintah terhadap kebutuhan publik yang mendesak.

Menurut Dye, kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah terkait tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Dalam hal ini, keputusan pemerintah untuk melaksanakan MBG menunjukkan adanya pilihan kebijakan yang secara khusus diarahkan untuk menangani persoalan gizi nasional. Kebijakan ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan langkah strategis yang memiliki dampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Jika dianalisis lebih dalam, keputusan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Prabowo memiliki orientasi pada pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan prioritas seorang pemimpin.

Kemampuan Prabowo dalam menggerakkan berbagai pihak juga menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan MBG. Implementasi program ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari kementerian kesehatan, pendidikan, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha lokal. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa kebijakan berskala nasional tidak dapat dijalankan secara individual oleh satu lembaga saja. Menurut Yudhistira (2021), gaya kepemimpinan Prabowo cenderung berorientasi pada target dan hasil yang konkret. Karakter ini mendukung percepatan koordinasi dalam menjalankan program yang memiliki cakupan luas.

Jika dikaitkan dengan teori kepemimpinan, kemampuan membangun koordinasi dan kerja sama merupakan indikator penting keberhasilan seorang pemimpin. Kepemimpinan tidak hanya diukur dari keberanian mengambil keputusan, tetapi juga dari kapasitas mengelola sumber daya dan aktor yang terlibat dalam kebijakan. Program MBG menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan koordinasi antar lembaga. Tanpa kerja sama yang baik, kebijakan yang telah dirumuskan dapat mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif harus mampu menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan bersama.

Dari perspektif teori pengambilan keputusan, kebijakan MBG menunjukkan adanya proses yang sistematis dalam menentukan solusi atas permasalahan masyarakat. Pemerintah melihat bahwa tingginya angka stunting dan rendahnya kualitas gizi masyarakat memerlukan langkah yang lebih konkret dan terarah. Berdasarkan teori Siagian (1997), pengambilan keputusan dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, hingga pemilihan solusi



yang dianggap paling tepat. Dalam konteks ini, MBG merupakan hasil dari proses tersebut yang dipilih sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak lahir secara spontan, tetapi melalui proses pertimbangan yang matang.

Namun demikian, keberhasilan kebijakan MBG tetap menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Besarnya anggaran yang dibutuhkan, kesiapan sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur di berbagai wilayah menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas program. Menurut analisis penulis, kepemimpinan Prabowo dalam menetapkan MBG memang menunjukkan keberanian politik dan visi jangka panjang, tetapi keberhasilan kebijakan tetap sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan dalam pengambilan kebijakan tidak hanya dinilai dari keberanian menetapkan program, tetapi juga dari kemampuan memastikan tujuan kebijakan tercapai secara optimal.

Faktor dan Dampak Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis pada Masa Kepemimpinan Prabowo Subianto

Pertimbangan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dari perspektif kebijakan publik, berbagai keterbatasan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi sebagian masyarakat mendorong pemerintah untuk merancang kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Di sisi lain, kondisi perekonomian nasional yang relatif stabil membuka ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pada sektor pelayanan publik, termasuk program yang berfokus pada perbaikan status gizi masyarakat (Kurniawan, 2025). Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai bentuk bantuan sosial yang bersifat sementara, tetapi juga dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Generasi yang memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai sejak dini diharapkan mampu berkembang menjadi tenaga kerja yang produktif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ditinjau dari aspek kepemimpinan, kebijakan ini mencerminkan upaya Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kehadiran program tersebut dapat dipahami sebagai respons pemerintah terhadap berbagai persoalan sosial, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dan pemerataan kualitas hidup. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari perhatian pemerintah terhadap berbagai tantangan kesejahteraan yang masih dihadapi masyarakat Indonesia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Oleh sebab itu, program ini diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia pada masa mendatang.

Selain faktor sosial dan ekonomi, aspek kesehatan serta pendidikan juga menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting dalam perumusan kebijakan tersebut. Pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, kedua aspek tersebut dipandang memiliki hubungan erat dengan kualitas generasi muda. Pemenuhan kebutuhan gizi sejak usia dini diyakini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan. Khomsan (2024) menjelaskan bahwa



kecukupan gizi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan otak serta kemampuan belajar anak. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan kesehatan, seperti stunting, kekurangan gizi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi makanan sehat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan fisik, daya tahan tubuh, maupun perkembangan kognitif anak. Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah menghadirkan kebijakan pemenuhan gizi melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis guna meningkatkan status gizi anak serta membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Dari sisi pendidikan, terpenuhinya kebutuhan gizi dipercaya mampu meningkatkan konsentrasi, daya serap, serta prestasi belajar peserta didik.

Kebijakan MBG memberikan manfaat positif terhadap kesehatan anak karena berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Konsumsi makanan yang seimbang dan bergizi berperan penting dalam menunjang pertumbuhan fisik, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta menjaga kondisi kesehatan secara menyeluruh. Dengan terpenuhinya kebutuhan nutrisi, risiko berbagai gangguan kesehatan akibat malnutrisi dapat ditekan. Selain itu, program tersebut juga berpotensi mencegah berbagai permasalahan gizi, seperti stunting, anemia, dan kekurangan gizi pada anak. Kandungan protein, vitamin, serta mineral yang memadai berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh secara optimal. Kondisi tersebut memungkinkan anak-anak tumbuh dengan lebih sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Selain berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, kebijakan tersebut juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh anak. Kecukupan asupan nutrisi memungkinkan sistem imun bekerja lebih optimal sehingga anak lebih mampu melawan berbagai penyakit maupun infeksi. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penurunan risiko gangguan kesehatan yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Manfaat lain yang diharapkan dari program ini adalah terbentuknya kebiasaan mengonsumsi makanan sehat sejak usia dini. Pemberian makanan bergizi secara berkelanjutan dapat membentuk pola konsumsi yang lebih seimbang sehingga kebiasaan tersebut berpotensi terbawa hingga masa dewasa. Dengan demikian, risiko munculnya penyakit tidak menular, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung, dapat diminimalkan pada masa mendatang.

Kondisi kesehatan yang lebih baik diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran secara optimal sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam konteks pembangunan, kesehatan dan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran penting dalam menentukan kemajuan bangsa. Perspektif kebijakan kesehatan menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi sejak usia dini memiliki keterkaitan yang erat dengan peningkatan kualitas pendidikan serta pencapaian akademik peserta didik. Oleh sebab itu, kebijakan penyediaan makanan bergizi tidak hanya diarahkan pada peningkatan status kesehatan anak, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Dampak positif kebijakan ini juga terlihat pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama bagi anak usia sekolah yang menjadi kelompok sasaran utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut memiliki potensi dalam menekan angka stunting dan malnutrisi melalui peningkatan konsumsi protein harian hingga mencapai 40 gram per hari. Selain itu, kecukupan asupan gizi berperan dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kondisi



fisik anak menjadi lebih baik (Khomsan, 2024). Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang memadai juga berpotensi menurunkan prevalensi anemia pada peserta didik hingga 25 persen. Di samping itu, berbagai kegiatan edukasi yang dilaksanakan di lingkungan sekolah turut meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang.

Kontribusi kebijakan ini tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa status gizi memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan belajar peserta didik. Anak yang memperoleh asupan nutrisi yang memadai cenderung memiliki kemampuan akademik yang lebih baik dibandingkan mereka yang mengalami kekurangan gizi. Secara fisiologis, fungsi otak memerlukan berbagai zat gizi, seperti glukosa, protein, zat besi, serta asam lemak omega-3 untuk mendukung daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan memproses informasi. Sebaliknya, kekurangan nutrisi dapat menyebabkan kelelahan, rendahnya motivasi belajar, serta kesulitan dalam berkonsentrasi. Oleh karena itu, peserta didik dengan status gizi yang baik cenderung lebih mudah memahami materi pembelajaran dan lebih aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penyediaan makanan bergizi di sekolah memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran. Data menunjukkan bahwa akses yang berkelanjutan terhadap makanan bergizi mampu meningkatkan tingkat kehadiran siswa sebesar 22 persen. Selain itu, kemampuan konsentrasi pada anak yang memiliki kecukupan gizi tercatat 18 persen lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang mengalami kekurangan gizi (Khomsan, 2024). Peningkatan tersebut berdampak pada kemampuan memahami materi, menyelesaikan tugas, serta pencapaian akademik secara keseluruhan. Di samping itu, kebijakan ini juga mendukung pemerataan akses pendidikan. Selama ini, keterbatasan ekonomi keluarga sering kali menjadi hambatan bagi anak untuk mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Tidak sedikit peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah yang menjalani kegiatan belajar dalam kondisi lapar atau dengan asupan gizi yang tidak memadai. Melalui program ini, setiap siswa memperoleh dukungan nutrisi yang relatif setara sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai prestasi akademik. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, peserta didik dapat lebih fokus dalam mengikuti kegiatan belajar tanpa terbebani oleh keterbatasan ekonomi (Khomsan, 2024).

Manfaat kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi memberikan dampak berkelanjutan terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak yang tumbuh dengan status gizi yang baik cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kecerdasan emosional yang lebih berkembang. Kemampuan tersebut merupakan modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, baik dalam bidang pendidikan maupun dunia kerja. Oleh karena itu, kebijakan pemenuhan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis dapat dipandang sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan gizi anak. Melalui sinergi antara sektor kesehatan dan pendidikan, program tersebut berpotensi menjadi langkah penting dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, serta memiliki daya saing pada tingkat global.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto dalam proses pengambilan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis mencerminkan karakter kepemimpinan yang tegas, visioner, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut dirancang sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan gizi, termasuk stunting dan keterbatasan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam proses pengambilan kebijakan, pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial, kesehatan, dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan program. Keputusan untuk melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis didorong oleh berbagai faktor strategis yang mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Tingginya angka stunting, malnutrisi yang terus berlanjut, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap makanan bergizi menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan ini. Dari sudut pandang kebijakan publik, Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dirancang untuk menangani masalah-masalah publik secara komprehensif melalui pendekatan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam proses kebijakan publik. Kepemimpinan yang memiliki arah dan tujuan yang jelas dapat mendukung pelaksanaan kebijakan agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Namun, keberhasilan program tetap memerlukan koordinasi yang baik, pengelolaan sumber daya yang efektif, serta dukungan dari berbagai pihak agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara umum, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kualitas perencanaan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu bersaing menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A., Hasan, L., Sari, M. W., Sari, V. N., Mahaly, S., Amane, A. P. O., Ningsih, D. A. W. S., Sukma, M., Hartati, Rismanto, D., Ilhami, S. D., & Mardika, N. H. (2023). *Kepemimpinan*. CV Gita Lentera.
- Andreas, K., Tambunan, H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025). *Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa*. 2.
- Basuki, R. M., Muharrom, N. W., & Kusuma, N. A. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1413–1423.
- Devia, D. (2025). Wawancara Penerima Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kompasiana. Diakses pada 18 Mei 2026. <https://www.kompasiana.com>
- Khomsan, A. (2024). Makan bergizi gratis dalam kaca mata data: Solusi atau delusi. *Student Article STIS*.



- Merlinda, A. A. And Yusmar Yusuf. (2025). Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1364-1373.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik Sholih Muadi Ismail MH Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Ahmad Sofwani. *Jurnal Review Politik*, 06(02), 195–224.
- Muktamar, A., Safitri, T., Nirwana, I., & Nurdin, N. (2023). Pengambilan Keputusan dalam Manajemen. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 2(3), 17–32.
- Nugroho, R. (2018). Kebijakan Publik di Indonesia: Substansi, Konteks, dan Strategi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Permana, A., Maulida, A., Husaeni, F., A, H. M., Ruhimasari, S., & Surya, P. P. (2025). Jurnal Penelitian Nusantara Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Unsur yang Membentuk Definisi Kebijakan Publik. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 453–457.
- Presiden RI. (2025). Presiden Prabowo: Program Makan Bergizi Gratis Adalah Investasi untuk Masa Depan Bangsa. Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Diakses pada 18 Mei 2026. <https://presidenri.go.id>
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Srifridayanti, S. And Samkamaria, S. (2023). Gaya Kepemimpinan Calon Presiden Pada Pilpres Tahun 2024. *Jurnal Administrator*, 5(2), 145–155.
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Thoha, Miftah. (2012). Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widiastuti, I. (2022). Kebijakan Publik. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Yudhistira, A. (2021). Jenis dan gaya kepemimpinan Prabowo Subianto. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. 01(03), 426–435.